



PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA CIKEMBAR KECAMATAN CIKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI

Septane Paradila Karunia Dewi¹⁾

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini berjudul "Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Cikembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi". Penelitian ini bertujuan mengetahui sejauh mana masyarakat Desa Cikembar, Sukabumi, berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan survei. Teknik pengumpulan data Melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Masalah yang ditemukan yaitu bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes masih terbatas. Meskipun warga aktif menyampaikan aspirasi, dominasi elit lokal, keterbatasan anggaran, dan kurangnya transparansi menghambat realisasi usulan mereka. Hasil pembangunan pun belum optimal karena alokasi dana yang tidak memadai dan kurangnya dukungan berkelanjutan. Evaluasi menunjukkan partisipasi masyarakat belum signifikan dalam mempengaruhi arah pembangunan desa. Untuk meningkatkan efektivitas Musrenbangdes, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. Pertama, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kedua, memperkuat transparansi dalam pengelolaan program dan alokasi anggaran. Terakhir, meningkatkan dukungan dari pemerintah desa dan pihak terkait untuk memastikan program-program yang diusulkan dapat terealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kata Kunci: Pembangunan, Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat.

Abstract

This research is entitled "Community Participation in Development Planning Deliberation in Cikembar Village, Cikembar Sub-district, Sukabumi District". This study aims to determine the extent to which the community of Cikembar Village, Sukabumi, participates in the Village Development Planning Meeting (Musrenbangdes). This research is a qualitative research with survey approach. Data collection techniques through interviews, observation, and document analysis. The problem

found was that community participation in Musrenbangdes was still limited. Although residents are active in expressing their aspirations, the dominance of local elites, budget limitations, and lack of transparency hinder the realization of their proposals. Development results have not been optimal due to inadequate allocation of funds and lack of sustainable support. The evaluation shows that community participation has not been significant in influencing the direction of village development. To improve the effectiveness of Musrenbangdes, this study recommends several things. First, increasing community capacity in development planning and implementation. Second, strengthening transparency in program management and budget allocation. Finally, increasing support from the village government and related parties to ensure that the proposed programs can be realized and provide real benefits to the community.

Keywords: *Development, Village Government, Community Participation.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta kewenangan untuk mengatur dan mengawasi urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya (Nain, 2019). Perbaikan kota yang adil di seluruh Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan memenuhi kebutuhan pokok dan menciptakan potensi keuangan lokal (Jaa et al., 2020). Dalam kerangka hukum ini, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) merupakan mekanisme utama untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Musrenbangdes, yang dilaksanakan tahunan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), berfungsi untuk mengkaji, membahas, dan menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) serta sumber-sumber subsidi pembangunan desa (Diarti & Legowo, 2020).

Proses perencanaan pembangunan desa dimulai dari tingkat dusun melalui Musyawarah Dusun (Musdus), dilanjutkan dengan Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, hingga Musrenbang Kabupaten dan Provinsi. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan ini sangat penting untuk memastikan

bahwa program pembangunan yang diusulkan benar-benar memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka (Hadawiya et al., 2021). Namun, dalam praktiknya, sering kali terdapat kesenjangan antara partisipasi masyarakat yang diharapkan dan realitas di lapangan. Sebagai contoh, Musrenbangdes di Desa Cikembar menunjukkan bahwa meskipun partisipasi masyarakat meningkat dari tahun ke tahun, efektivitas dan kualitas keterlibatan tersebut masih perlu ditingkatkan (Tawai & Yusuf, 2017).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa masalah pokok yang perlu dikaji:

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Cikembar?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan rencana pembangunan yang disepakati pada Musrenbangdes?
3. Bagaimana masyarakat merasakan pelaksanaan hasil dan evaluasi Musrenbangdes di Desa Cikembar?

Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pada Musrenbangdes di Desa Cikembar.
2. Menilai efektivitas partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan rencana pembangunan yang dihasilkan dari Musrenbangdes.
3. Mengevaluasi bagaimana masyarakat merasakan hasil dari Musrenbangdes dan dampaknya terhadap pembangunan desa.

Dengan memahami tingkat partisipasi dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas

Musrenbangdes dalam merespons kebutuhan masyarakat dan mewujudkan pembangunan desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan secara ringkas materi dan metode yang digunakan dalam penelitian ini, mencakup subjek/objek penelitian, alat yang digunakan, desain penelitian, teknik pengambilan sampel, variabel yang diukur, teknik pengumpulan data, serta analisis dan model statistik yang diterapkan.

Subjek/Objek Penelitian

Penelitian ini berfokus pada masyarakat Desa Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sebagai unit analisis, individu masyarakat dipilih karena dianggap dapat memberikan wawasan penting mengenai tingkat partisipasi mereka dalam perencanaan pembangunan desa.

Alat yang Digunakan

Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara, foto, rekaman, dan dokumen yang digunakan untuk mengumpulkan data. Alat bantu tambahan seperti laptop, ponsel, flash disk, dan alat tulis juga digunakan untuk mendukung efisiensi proses pengumpulan data (Sugiono dalam Sukendra & Atmaja, 2020: 1484).

Rancangan Penelitian

Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan survei. Penelitian ini mengadopsi metode survei untuk mengumpulkan data dari sampel yang diambil dari populasi besar atau kecil, bertujuan untuk mengidentifikasi pola, distribusi, dan hubungan antara variabel sosiologis dan psikologis (Kerlinger dalam Sugiyono, 2019: 106). Penelitian ini termasuk dalam kategori deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau peristiwa yang terjadi saat ini (Sudjana dan Ibrahim dalam Jayusman & Shavab, 2020: 15).

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, di mana informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan yang terlibat meliputi kepala desa, perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan masyarakat umum.

Variabel yang Diukur

1. Kemauan politik untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
2. Hasil keputusan yang pro-rakyat dan inklusif.
3. Komitmen peserta dalam pelaksanaan Musrenbangdes.
4. Tanggung jawab atas rencana yang disepakati.
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.
6. Dampak positif hasil Musrenbangdesa terhadap kehidupan masyarakat.
7. Efektivitas program dalam mengatasi permasalahan desa.
8. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi hasil Musrenbangdesa dan penggunaan metode evaluasi partisipatif.

Teknik Pengumpulan Data

1. **Observasi:** Dilakukan dengan kunjungan langsung ke kantor desa untuk memperoleh data mendetail tentang pelaksanaan pembangunan dan partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes.
2. **Wawancara:** Dilakukan dengan informan terpilih untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai pelaksanaan pembangunan dan partisipasi masyarakat.
3. **Studi Pustaka:** Melibatkan pencarian dan analisis sumber referensi relevan seperti buku, literatur, jurnal ilmiah, e-book, dan repository untuk mendukung data teoritis penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui proses sistematis yang

melibatkan:

1. **Reduksi Data:** Mengeliminasi data yang tidak relevan, merangkum informasi penting, dan mengidentifikasi tema serta pola dari data yang diperoleh (Neliwati, 2018: 184).
2. **Display Data:** Menyajikan data dalam format narasi, diagram, atau hubungan antar kategori untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi data.
3. **Penarikan Kesimpulan:** Mengambil kesimpulan awal yang bersifat sementara dan dapat berubah berdasarkan bukti yang dikumpulkan. Kesimpulan dianggap kredibel jika didukung oleh bukti yang konsisten dan valid.

Model Statistik

Dalam penelitian kualitatif ini, tidak digunakan model statistik formal karena fokus utama adalah pada analisis deskriptif dan interpretatif data kualitatif.

Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data diperiksa menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan memverifikasi data dari berbagai informan atau sumber untuk meningkatkan validitas dan akurasi temuan penelitian (Susanto & Jailani, 2023: 53; Sugiyono dalam Alfansyur & Mariyani, 2020: 146-150).

PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Cikembar

Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Cikembar Desa Cikembar terletak kurang lebih 42 km dari ibu kota Kabupaten Sukabumi, dengan aksesibilitas yang baik, sekitar 112 km dari Kota Bandung dan 145 km dari Jakarta. Desa ini terletak di ketinggian sekitar 365 meter di atas permukaan laut, dengan curah hujan tahunan rata-rata sekitar 115 mm dan suhu tahunan berkisar antara 25°C hingga 28°C. Pada tahun 2023,

jumlah penduduk Desa Cikembar mencapai 14.350 jiwa, terdiri dari 7.102 laki-laki dan 7.248 perempuan. Terdapat 4.250 rumah tangga, dengan rata-rata sekitar 3 orang per keluarga.

Seperti desa lainnya, Desa Cikembar setiap tahunnya menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai wadah untuk merancang rencana pembangunan desa. Pada tahun 2023, Musrenbangdes dilaksanakan pada bulan Januari dan dibagi menjadi tiga tahap yaitu pra Musrenbangdes, pelaksanaan, dan pasca Musrenbangdes.

Pada tahap pra Musrenbangdes, Pemerintah Desa Cikembar sebagai penanggung jawab membentuk panitia atau Tim Pelaksana Musrenbang (TPM) yang beranggotakan perangkat desa yang mendapat Surat Keputusan (SK) Langsung dari kepala desa. TPM ini beranggotakan 7 orang perangkat desa, didukung oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Masyarakat Desa, melibatkan unsur PKK, Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Susunan panitianya antara lain Kepala Desa dan Ketua BPD sebagai penanggung jawab, Ketua LPMD sebagai ketua penyelenggara, Sekretaris Desa sebagai sekretaris penyelenggara, serta Ketua PKK, Kepala Bagian Perencanaan, dan Kepala Bagian Kesra.

Ada tiga alasan yang menjelaskan mengapa partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam perencanaan pembangunan, yaitu sebagai berikut Partisipasi masyarakat sebagai instrumen untuk mengidentifikasi kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat terhadap program pembangunan.

Kepercayaan yang harus dibangun, yang bisa dicapai bila pemerintah mau melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Dalam pembangunan, partisipasi masyarakat dijamin oleh demokrasi.

Tahap pra Musrenbangdes selanjutnya adalah mengadakan rapat koordinasi satu bulan sebelum Musrenbangdes. Rapat ini

melibatkan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pejabat Perencanaan, dan Kepala Dusun. Tujuan rapat koordinasi adalah untuk menetapkan jadwal pelaksanaan Musrenbangdus dan Musrenbangdes. Kepala Desa Cikembar menginformasikan kepada peserta bahwa desa akan segera melaksanakan Musrenbangdes sehingga perlu segera ditentukan jadwalnya.

Sebelum pelaksanaan Musrenbangdes, seluruh wilayah yang terbagi dalam beberapa dusun melakukan pengumpulan aspirasi masyarakat untuk menyampaikan usulan program melalui forum Musrenbangdus. Musrenbangdus merupakan tahapan awal dalam proses Musrenbangdes yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan pembangunan di setiap dusun sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Bapak Apit Yuliana, Kepala Dusun Palimabelas, dalam wawancara pada Kamis, 1 Juni 2024:

“Sebelum Musrenbangdes dilaksanakan, Musrenbangdus dilakukan dengan melibatkan perwakilan dari tingkat RT, RW, PKK, Karang Taruna, LPMD, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Musrenbangdus bertujuan untuk mengumpulkan usulan dan kebutuhan dari berbagai pemangku kepentingan, yang akan disampaikan dalam Musrenbangdes mendatang.”

Musrenbangdus melibatkan seluruh pemangku kepentingan di tingkatdusun, karena warga setempatlah yang paling memahami permasalahan, potensi, dan kebutuhan di wilayahnya. Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat di tingkat akar rumput, diharapkan program-program yang diusulkan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Jadwal Musrenbangdus sebelumnya telah ditentukan oleh Pemerintah Desa, dengan harapan Kepala Desa dapat menghadiri setiap acara Musrenbangdus di Desa Cikembar. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Apit Yuliana warga Dusun Palimabelas dalam wawancara pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2024 pukul 10.00

- 10.30 WIB

“Pemerintah desa telah menjadwalkan waktu untuk setiap Dusun, dan setiap Dusun akan menyiapkan acara Musrenbangdus sesuai tanggal yang ditetapkan oleh pemerintah desa. Dalam Musrenbangdus, tim pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, serta beberapa staf akan hadir. Kepala Desa memberikan sambutan dan arahan mengenai program- program yang akan diusulkan untuk Musrenbangdes. Setelah pidato Kepala Desa selesai, seluruh perangkat desa akan meninggalkan lokasi, dan proses pengumpulan aspirasi dilanjutkan oleh dusun dan warga sekitar.”

Pembentukan tim oleh pemerintah desa bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada peserta Musrenbangdus agar program kerja yang diusulkan dapat selaras dengan program desa yang dituangkan dalam RPJMDes. Musrenbangdus di Desa Cikembar dilaksanakan di aula Dusun, berlangsung mulai pukul 19.00 hingga 21.30 dan melibatkan unsur RT, RW, PKK, Karang Taruna, serta tokoh agama dan masyarakat. Tn.

Dedy Rahmat, BPD Desa Cikembar, memaparkan Musrenbangdus dalam wawancara pada 11 Mei pukul 11.00 - 12.30 WIB, sebagai berikut: “Sebelum Musrenbangdes, kami selalu melakukan perencanaan di tingkat Dusun dan berkoordinasi dengan pihak RT, RW, LPMD. , PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta Karang Taruna, di bawah bimbingan tim desa Sebelum dilaksanakan Musrenbangdus.”

Hasil musyawarah di Desa Cikembar, RT mengusulkan pembangunan infrastruktur berupa pengerasan jalan karena pada musim hujan banyak jalan yang terendam banjir sehingga mengganggu pengguna jalan. Usulan ini sebenarnya sudah diajukan tahun lalu namun belum terealisasi karena diprioritaskan pada program yang lebih mendesak. PKK mengusulkan pemberdayaan perempuan melalui pelatihan

menjahit. Sebelumnya pelatihan ini telah dilakukan namun hanya dikirim dua peserta sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah desa. Tahun ini kembali diusulkan dengan harapan bisa mengirimkan lebih banyak peserta karena antusias yang tinggi dari kalangan ibu-ibu. Peserta pelatihan sebelumnya kini sudah bisa menjahit dan sudah membentuk kelompok menjahit, sehingga banyak perempuan lain yang berharap bisa mengikuti pelatihan menjahit.

Pelatihan pertanian fokus budidaya mentimun dan kacang panjang di Desa Cikembar mendapat respon positif dari para petani. Sebagai langkah awal, pemerintah desa bekerja sama dengan dinas pertanian setempat merancang program pelatihan yang komprehensif. Dalam proposal ini, pelatihan akan mencakup teknik pertanian yang lebih efisien dan ramah lingkungan, penggunaan pupuk organik, dan metode irigasi yang tepat. Para petani berharap dengan adanya pelatihan ini mereka dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertaniannya. Pak Hadi Susanto menyatakan dalam wawancara pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2024 pukul 10.00 - 10.30 WIB:

“Saya sangat antusias dengan usulan pelatihan pertanian yang fokus pada budidaya mentimun dan kacang panjang. Seringkali kita menghadapi tantangan dalam meningkatkan hasil pertanian karena kurangnya pengetahuan tentang teknik bertani yang efisien dan ramah lingkungan. Proposal pelatihan ini hadir di saat yang tepat, dan saya percaya bahwa dengan bimbingan yang tepat, kita dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen kita. Pelatihan ini tidak hanya memberikan kita pengetahuan baru tetapi juga memotivasi kita untuk menerapkan metode irigasi yang lebih baik dan menggunakan pupuk organik yang dapat menjaga kesuburan tanah.”

Proposal ini juga mencakup penyediaan alat dan bahan pertanian yang diperlukan untuk menerapkan teknik baru yang akan diajarkan. Para petani di desa tersebut merasa bahwa pelatihan

semacam itu penting untuk membantu mereka beradaptasi terhadap perubahan iklim dan kondisi pasar. Mereka optimis dengan dukungan pemerintah desa dan instansi terkait, pelatihan ini dapat segera dilaksanakan dan membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan mereka.

Namun, ada kekhawatiran mengenai apakah proposal ini akan mendapat persetujuan dan pendanaan yang memadai, mengingat keterbatasan anggaran yang sering menjadi tantangan. Anggota Karang Taruna yang hadir terkesan pasif dan tidak mengajukan usulan karena sebagian besar dari mereka masih terlalu muda dan belum memahami sepenuhnya program kerja Karang Taruna.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Rencana Pada Musyawarah Pembangunan Desa Cikembar

Penyelenggaraan hasil Musrenbang di Desa Cikembar merupakan tonggak penting dalam terciptanya hubungan erat antara pemerintah desa dan masyarakatnya dalam proses pembangunan. Usai Musrenbangdes, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan program pembangunan yang telah disepakati. Mereka tidak hanya mendapatkan manfaat dari pembangunan tetapi juga berperan penting dalam mewujudkan visi pembangunan desa. Keterlibatan mereka terlihat jelas dalam berbagai kegiatan dan inisiatif, mulai dari pembangunan jalan hingga pelatihan keterampilan. Kontribusi swadaya masyarakat juga penting dalam pendanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan, dengan menekankan komitmen dan tanggung jawab bersama dalam meningkatkan infrastruktur dan kesejahteraan desa.

Meskipun ada partisipasi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan Musrenbangdes, tantangan seperti keterbatasan anggaran perlu diatasi untuk memaksimalkan partisipasi dan memastikan program pembangunan memenuhi kebutuhan masyarakat. Peran masyarakat juga mencakup pemantauan

dan pengawasan pelaksanaan program pembangunan untuk memastikan penggunaan dana desa yang efisien dan transparan. Umpan balik dari masyarakat membantu memastikan efektivitas program yang dilaksanakan dan mencerminkan keinginan mereka terhadap pembangunan berkualitas yang selaras dengan kebutuhan mereka.

Implementasi program Pelatihan Hidroponik, IT, dan Menjahit di Desa Cikembar menunjukkan kompleksitas proses pembangunan desa. Meskipun usulan pelatihan menjahit bertujuan untuk memberdayakan perempuan, kendala keuangan dan dukungan yang kurang optimal dapat menghambat efektivitas program. Usulan pelatihan TI menunjukkan kesadaran akan pentingnya keterampilan teknologi di kalangan pemuda, meskipun masalah alokasi anggaran atau kurangnya minat dari anggota mungkin berdampak pada pelaksanaannya. Usulan pelatihan menjahit mencerminkan keinginan masyarakat terhadap pengembangan, namun berbagai kendala dapat mempengaruhi pelaksanaan program.

Menjadi relawan atau bagian tim pelaksana hasil Musrenbang dapat melibatkan masyarakat secara signifikan dalam pembangunan desa. Pengalaman ini meningkatkan pemahaman mereka tentang proses pembangunan, memperkuat rasa kepemilikan, dan menumbuhkan tanggungjawab terhadap hasil yang dicapai. Partisipasi dalam program-program tersebut memungkinkan masyarakat berkontribusi positif terhadap pembangunan desa dan meningkatkan kapasitas mereka untuk mendorong perubahan proaktif demi tujuan bersama.

Masyarakat berpartisipasi aktif dalam berbagai tahapan pembangunan, namun terkadang mereka merasa terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program yang telah disepakati. Meskipun terdapat tantangan seperti terbatasnya anggaran dan tingkat partisipasi yang tidak merata, upaya untuk meningkatkan keterlibatan dan pemberdayaan

masyarakat sangat penting untuk mencapai hasil pembangunan yang berarti dan kemajuan desa.

Meskipun masyarakat secara aktif mengusulkan program-program pembangunan, faktor-faktor eksternal seringkali menghambat pelaksanaannya. Oleh karena itu, dukungan solid dari pemerintah desa dan instansi terkait sangat penting untuk memastikan usulan masyarakat terealisasi secara optimal demi kemajuan kolektif desa. Kesiapan masyarakat untuk terlibat dalam segala aspek pembangunan mencerminkan kesadaran dan kepemilikan mereka terhadap pembangunan desa.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Hasil dan Evaluasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Cikembar

Realisasi hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Cikembar memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan desa. Musrenbangdes sejak awal menjadi wadah penting bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan usulannya. Proses ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tingkat RT/RW, dusun, hingga berbagai kelompok masyarakat seperti kelompok tani. Usulan-usulan ini kemudian diprioritaskan berdasarkan kebutuhan dan urgensinya, mencakup berbagai bidang seperti infrastruktur, pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.

Berdasarkan observasi, masyarakat Desa Cikembar telah menunjukkan partisipasi aktif dalam Musrenbangdes mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Antusiasme mereka terlihat dari kehadiran dan keterlibatan mereka yang aktif dalam diskusi, menyuarakan aspirasi, berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, dan mengawasi pelaksanaan program. Meskipun menghadapi beberapa tantangan, upaya seperti peningkatan anggaran, transparansi, dan evaluasi berkala perlu

dilakukan untuk memaksimalkan partisipasi dan memastikan bahwa program pembangunan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi ini menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai peran penting dalam menentukan arah pembangunan desa dan memastikan bahwa program benar-benar bermanfaat bagi mereka.

Meskipun antusiasme masyarakat cukup tinggi pada tahap perencanaan, pelaksanaan program yang diusulkan seringkali menemui berbagai tantangan. Misalnya, program pelatihan menjahit yang diusulkan oleh kelompok PKK menghadapi kendala karena keterbatasan anggaran dan tantangan dalam menyeleksi peserta secara adil dan inklusif. Kurangnya pendanaan seringkali menghambat realisasi program yang diusulkan karena terbatasnya anggaran desa dan adanya persaingan prioritas di antara berbagai kebutuhan.

Pelatihan TI yang diusulkan oleh kelompok Karang Taruna juga menghadapi tantangan serupa karena kurangnya peralatan dan fasilitas pendukung. Program budidaya mentimun dan kacang panjang juga menghadapi tantangan yang kompleks dalam mengoptimalkan nilai tambah produk pertanian dan memberikan peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Tantangan teknis seperti kurangnya pengetahuan tentang teknik bertani yang benar dan terbatasnya alat pertanian juga perlu diatasi.

Kolaborasi dengan pihak eksternal seperti perguruan tinggi atau lembaga pelatihan diperlukan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan yang memadai. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hasil panen petani dan memaksimalkan manfaat ekonomi dari kegiatan usahatani mentimun dan kacang panjang.

Secara keseluruhan, pelaksanaan hasil Musrenbangdes di Desa Cikembar menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa. Meskipun terdapat tantangan, dengan dukungan yang memadai, inisiatif-

inisiatif ini berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong kemajuan secara keseluruhan di Desa Cikembar. Evaluasi yang berkelanjutan dan dukungan penuh dari semua pihak akan sangat menentukan keberhasilan rencana upaya pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat desa.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangdes) di Desa Cikembar menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan telah diperhatikan dan didorong secara aktif, memberikan peluang bagi penduduk untuk menyuarakan kepentingan dan aspirasi mereka. Meskipun demikian, terdapat kecenderungan dominasi oleh pemerintah desa yang dapat mempengaruhi keseimbangan dalam pengambilan keputusan. Partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk pengawasan dan evaluasi, mencerminkan komitmen mereka terhadap kemajuan yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, kendala seperti keterbatasan anggaran dan pengambilan keputusan yang terpusat masih mempengaruhi efektivitas proses tersebut. Musrenbangdes yang dilaksanakan menunjukkan partisipasi tinggi dari masyarakat, namun sering kali terhambat oleh masalah anggaran dan teknis. Untuk meningkatkan efektivitas program, dukungan penuh dari pemerintah desa dan lembaga terkait sangat diperlukan, bersama dengan upaya untuk mengatasi kendala yang ada dan memperbaiki pelaksanaan serta evaluasi program pembangunan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang:

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14.

Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas. Surat Edaran No. 0259/M.PPN/I/2011 dan No. 050/166/SJ/2011.

Buku:

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (1st ed., Issue 1). CV. syakir Media Press.

Abidin, D. (2023). *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN* (D. E. Winoto (ed.)). EUREKA MEDIA AKSARA

Achmad KM., M.Si, H. M. (2018). Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa. In *PT Balai Pustaka* (Vol. 7, Issue 1).

Hutagalung, S. S. (2022). *BUKU AJAR PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN DI SEKTOR PUBLIK*. CV. Literasi Nusantara Abadi.

Nain, U. (2019). *PEMBANGUNAN DESA DALAM PERSPEKTIF SOSIOHISTORIS*

(M. Faisal (ed.)). GARIS KHATULISTIWA.

Neliwati. (2018). Metodologi Penelitian Kuantitatif (Kajian Teori Dan Praktek). In *CV. Widya Puspita* (Issue 57).

<http://repository.uinsu.ac.id/8959/1/BUKU> METODOLOGI

PENELITIAN KUANTITATIF.pdf

- Saleh, S. (2017). ANALISIS DATA KUALITATIF. In *Analisis Data Kualitatif*. Penerbit: Pustaka Ramadhan.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA, cv.
- Susanto, D., & Jailani, M. S. (2023). *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah*. 1(1), 53–61.

Jurnal:

- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146–150.
- Diarti, A. M., & Legowo, M. (2020). Pengaruh Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Bumdes Se-Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik. *Paradigma*, 9(1), 1–22.
- Hadawiya, R., Muda, I., & Batubara, B. M. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 192–200.
- Jaa, E., Sulisty, S., & Setiyowati, S. W. (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 7(1), 1–9.
- Jayusman, I., & Shavab, O. A. K. (2020). Aktivitas Belajar Mahasiswa Dengan Menggunakan Media Pembelajaran Learning Management System (Lms) Berbasis Edmodo Dalam Pembelajaran Sejarah. *Jurnal Artefak*, 7(1), 13. <https://doi.org/10.25157/ja.v7i1.3180>
- Mohd Sahib Padilla. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 7
- Prasetyo, D., & Irwansyah. (2020). MEMAHAMI MASYARAKAT DAN PERSPEKTIFNYA. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(1).
- Riadi, M. (2020). *Partisipasi Masyarakat (Prinsip, Jenis, Tingkatan dan Faktor yang Mempengaruhi)*. KAJIANPUSTAKA. <https://www.kajianpustaka.com/2020/01/partisipasi-masyarakat.html>
- Rudi. (2022). Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa. In AURA (Ed.), *Jurnal Justiciabelen* (Vol. 1, Issue 2). AURA.
- Samad, Z., Mustanir, A., & Pratama, M. Y. P. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Untuk Mewujudkan Good Governance Kabupaten

Enrekang. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(4), 379-395.
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/File/3014/2750>

- Setiawan, A., Suwaryo, U., & Rahmatunnisa, M. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung Studi Kasus di Desa Margamukti, Desa Sayati, Desa Ciburial dan Desa Nanjung Kabupaten Bandung. *Jurnal Academia Praja*, 3(2), 251-270.
- Sukendra, I. K., & Atmaja, I. K. S. (2020). Instrumen Penelitian. In *Journal Academia*.
- Tawai, A., & Yusuf, M. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan. In H. Amiruddin (Ed.), *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* (Vol. 12, Issue 03). Letracy Institue.
- Uceng, A., Erfina, E., Mustanir, A., & Sukri, S. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 18-32.

